

STUDI LITERATUR: KOMPETENSI AUDITOR DAN KEAHLIAN SISTEM INFORMASI AUDITOR TERHADAP PEMBUKTIAN FRAUD

Debby Yusriliana rahmawati ¹, Tri Ratnawati²

Debby1222000011@untag-sby.ac.id¹, triratnawati@untag-sby.ac.id²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

ABSTRACT

One part of these efforts is to increase supervision and guidance of the apparatus to stop corrupt behavior in the work environment, and to fully support efforts to prosecute corruption carried out by the Indonesian National Police, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and the Corruption Eradication Commission (KPK) by accelerating the dissemination of information about corruption cases and accelerating examination permits for corruption cases. Apart from having to understand auditing and accounting, investigative auditors must also understand the law in relation to cases of irregularities or fraud that can harm State finances (Karyono, 2013: 132). Investigative auditors must have the ability to prove the existence of fraud that may occur and has been detected by various parties before conducting an investigative audit. One of these responsibilities is that investigative audits must be carried out by officers who have the necessary expertise. Auditors must have the ability to prove possible fraud that has been pointed out by various parties beforehand. Auditors have technical expertise, which consists of procedural knowledge and other clerical skills in accounting and auditing.

Keywords : Auditor Competency, Auditor Independence, Auditor Information System, Audit Investigation.

ABSTRAK

Upaya tersebut salah satunya adalah dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan aparatur untuk menghentikan perilaku korupsi di lingkungan kerja, dan mendukung penuh upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mempercepat sosialisasi kasus korupsi dan mempercepat izin pemeriksaan kasus korupsi. Selain harus memahami auditing dan akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami hukum terkait dengan kasus-kasus penyimpangan atau penipuan yang dapat merugikan keuangan Negara (Karyono, 2013:132). Auditor investigatif harus mempunyai kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang mungkin terjadi dan telah terdeteksi oleh berbagai pihak sebelum melakukan audit investigatif. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah audit investigatif harus dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai keahlian yang diperlukan. Auditor harus mempunyai kemampuan untuk membuktikan kemungkinan adanya kecurangan yang telah dikemukakan oleh berbagai pihak sebelumnya. Auditor memiliki keahlian teknis, yang terdiri dari pengetahuan prosedural dan keterampilan klerikal lainnya di bidang akuntansi dan audit.

Kata Kunci : Kompetensi Auditor, Independensi Auditor, Sistem Informasi Auditor, Investigasi Audit

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak berdirinya negara, tujuan utama Indonesia adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat menghambat kemajuan negara harus segera ditangani. Kejahatan kerah putih, juga dikenal sebagai "kejahatan kerah putih", adalah salah satu contoh kejahatan yang dapat menghambat kemajuan negara. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) (2008), Hazel Croal menggunakan istilah "kejahatan kerah putih" untuk menggambarkan berbagai tindak kejahatan yang terjadi di lembaga pemerintahan, yang terjadi baik secara struktural dan melibatkan sekelompok orang maupun individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim yang ditetapkan oleh hukum.

Seringkali, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas untuk membuat hukum dan membuat keputusan penting. Sistem patronase, kekuasaan memberikan berbagai tugas kepada mesin birokrasi di semua tingkatan memungkinkan kejahatan kerah putih terjadi dalam lingkungan tertutup. White collar crime berbeda dari blue collar crime. Blue collar crime mengacu pada kejahatan yang terjadi di tingkat bawah dengan kuantitas dan kualitas rendah, sedangkan white collar crime mengacu pada petinggi negara dan kejahatan hitam.

Seperti yang ditunjukkan oleh data yang disampaikan oleh Transparency International (TI), korupsi yang masih ada di Indonesia pasti akan menghambat kemajuan dan pembangunan nasional, menghambat kesejahteraan sosial. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi memerintahkan semua lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil tindakan apa pun untuk memberantas korupsi. Salah satu bagian dari upaya tersebut adalah untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan aparaturnya untuk menghentikan perilaku korupsi di lingkungan kerja, dan untuk mendukung penuh upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mempercepat penyebaran informasi tentang kasus tindak pidana korupsi dan mempercepat izin pemeriksaan untuk kasus tindak pidana korupsi.

Meskipun korupsi tidak dapat benar-benar dihilangkan, ada kemungkinan untuk menguranginya segera (Listyo, 2005). Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga dengan tujuan yang sama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Kejaksaan dan Pengadilan harus membuktikan kecurigaan mereka kepada seseorang mengenai apakah seseorang benar-benar

tersangka korupsi atau tidak. Melakukan pengusutan tindak pidana diluar bidang hokum pengadilan dapat dibantu oleh seorang ahli. Adapun ahli ekonomi atau ahli keuangan yang dapat membantu adalah seorang auditor. Hal ini sesuai dengan pasal 1 butir 20 KUHAP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pelaksanaan audit investigasi berbeda dengan pelaksanaan general audit karena audit ini berhubungan langsung dengan proses litigasi. Hal ini menyebabkan tugas dari seorang auditor investigatif lebih berat daripada tugas auditor dalam general audit. Selain harus memahami tentang pengauditan dan akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami tentang hukum dalam hubungannya dengan kasus penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan keuangan Negara (Karyono, 2013:132).

Auditor investigatif harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang mungkin terjadi dan telah terdeteksi oleh berbagai pihak sebelum melakukan audit investigasi. Metode dan teknik yang digunakan selama proses penyelidikan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku. Hal ini pasti berdampak pada pengumpulan dan pengujian bukti yang berkaitan dengan penyimpangan atau kecurangan. Auditor memiliki beberapa tanggung jawab umum yang harus dipenuhi agar tujuan audit investigasi dapat tercapai. Salah satu dari tanggung jawab ini adalah audit investigasi harus dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian yang diperlukan. Auditor harus memiliki kemampuan untuk membuktikan kecurangan yang mungkin terjadi dan telah ditunjukkan oleh berbagai pihak sebelumnya. Kemampuan yang dimiliki auditor investigasi tidak dapat dipelajari dalam hal mengungkap kecurangan melainkan belajar dari pengalaman. Auditor harus memperhatikan semua hal yang tidak wajar, apakah itu terlalu besar, terlalu kecil, terlalu sering, terlalu rendah, terlalu banyak, atau terlalu sedikit, atau kesan yang tidak wajar. Kemudian auditor harus melakukan penyelidikan untuk menjelaskan penyebabnya dan efeknya.

Karena banyaknya kasus korupsi, pemerintah juga terus memperbaiki sistem keuangan dan tatakelola. Namun, auditor menghadapi masalah baru karena hal ini. Perusahaan besar maupun kecil sekarang menggunakan teknologi informasi yang sangat rumit dan kompleks. Teknologi informasi (TI) telah mengubah cara perusahaan mengumpulkan dan melaporkan informasi. Oleh karena itu, auditor menghadapi banyak lingkungan TI yang mengatur data dalam media elektronik dibandingkan data dalam media kertas (Cerullo dan Cerullo, 2003). Namun ironisnya, pada kondisi di lapangan tidak banyak para auditor yang bisa memanfaatkan akses dari peranan teknologi informasi dalam mengaudit sistem informasi yang berbasis pada komputerisasi akuntansi baik pada saat input, proses sampai dengan output. Auditor selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks, banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu dengan lainnya. (Pradutaningrum dan Januarti, 2012). AICPA (2001) menyatakan bahwa auditor laporan keuangan dianjurkan untuk mengubah strategi audit terkait dengan perubahan yang diakibatkan oleh teknologi informasi (TI) yang digunakan klien. Menurut Rios-Figueroa dan Cardona (2013), auditor menggunakan penilaian profesional untuk mengumpulkan dan

melakukan evaluasi bukti dalam menerbitkan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan.

Institut Akuntan Publik Indonesia (2013) dalam Standar Audit 620 Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor menjelaskan jika keahlian di suatu bidang selain akuntansi atau audit diperlukan untuk mendapatkan bukti audit kompeten yang cukup dan tepat, auditor harus menentukan apakah ia perlu menggunakan pekerjaan seorang pakar auditor. Menurut Abdolmohammadi dan Wright (1987), keahlian audit mencakup dua kemampuan teknis dan non-teknis. Auditor memiliki keahlian teknis, yang terdiri dari pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya di bidang akuntansi dan auditing. Sementara itu, keahlian non-teknis adalah kemampuan internal auditor, yang dipengaruhi oleh kepribadian dan pengalaman mereka. Keahlian auditor dapat berkembang seiring dengan pengalaman kerja dan praktik audit.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem informasi auditor pada prosedur audit dalam pembuktian kecurangan?
2. Bagaimana kemampuan auditor investigative dalam menilai proses audit pembuktian kecurangan?
3. Bagaimana dalam keahlian sistem informasi auditor dan kemampuan auditor investigative efektif dalam pembuktian kecurangan?

Tujuan

1. Efektifitas keahlian sistem informasi auditor pada pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan
2. Kemampuan auditor investigative terhadap pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan
3. Kemampuan auditor investigative dan keahlian sistem informasi auditor terhadap pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan

TINJAUAN PUSTAKA

Auditing

Auditing adalah pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak yang independen dimana hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor dapat memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan. Menurut Alvin A. Arens, Elder dan Beasley (2011:4) mendefinisikan auditing “Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang

informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antar informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dalam deskripsi”.

Menurut Soekrisno Agoes (2004:3) mendefinisikan auditing, suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dapat disimpulkan yaitu proses sistematis, Auditing merupakan suatu proses sistematis, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi.

Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Seorang auditor harus cukup qualified untuk memahami kriteria yang digunakan dan cukup kompeten untuk mengetahui berapa jumlah dan jenis bukti yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan. Seorang auditor juga harus memiliki sikap mental yang independen. Kriteria yang ditetapkan. Standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan dapat berupa:

- a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislative
- b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen
- c. Prinsip akuntansi yang lazim diterapkan (Generally accepted accounting principles)
- d. GAAS
- e. Prinsip Auditing
- f. IAS

Pelaporan merupakan alat untuk mengkomunikasikan penemuan pada pihak yang berkepentingan. Laporan yang dilakukan dalam bentuk tertulis ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat keuangan atas pernyataan yang dibuat oleh pihak yang menjadi auditee.

Teori Fraud Triangle

Teori fraud triangle merupakan teori yang harus dimasukkan ke dalam rencana audit kecurangan. Teori ini menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen seperti tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga elemen kecurangan hidup bersama pada tingkat yang berbeda di dalam organisasi dan mempengaruhi setiap individu secara berbeda (Vona, 2008:7). Teori ini kemudian dikembangkan secara skematis oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). ACFE menggambarkan fraud dalam bentuk fraud tree. Fraud tree ini biasanya disajikan dalam bentuk bagan. Fraud tree mempunyai tiga cabang utama, yaitu corruption, asset misappropriation, dan fraudulent statements (Tuanokotta, 2012:197). Pengukuran tiga elemen fraud triangle tidak sesederhana mengukur temperatur seseorang. Proses audit harus mengidentifikasi dan memahami bagaimana kondisi kecurangan tersebut

menyebabkan kemungkinan terjadinya kecurangan yang sebenarnya (Vona, 2008:8). Oleh karena itu, dibutuhkan auditor yang kompeten dalam mendeteksi dan membuktikan terjadinya kecurangan. Teori tersebut menjadi dasar bagi Auditor Investigatif dalam penelusurannya untuk membuktikan suatu kecurangan yang terjadi. Auditor Investigatif harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mengungkap suatu kecurangan.

Teori Atribusi

Teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Perilaku seseorang oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal. Hal yang sama dikemukakan Robbins (2003) bahwa teori atribusi merupakan dari penjelasan cara cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal yang tergantung pada tiga factor seperti pada teori triangle fraud.

Kekhususan merujuk pada apakah seseorang individu memperlihatkan perilaku yang berlainan, yang ingin diketahui adalah apakah perilaku ini luar biasa atau tidak. Jika luar biasa, maka kemungkinan besar pengamat memberikan atribusi eksternal kepada perilaku tersebut. Jika tidak, kelihatannya hal ini akan dinilai sebagai sifat internal.

Konsensus jika semua orang yang menghadapi suatu situasi yang serupa bereaksi dengan cara yang sama. Konsistensi dicari dari tindakan seorang apakah orang tersebut memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Makin konsistensi perilaku, maka hasil pengamatan semakin cenderung untuk menghubungkan dengan sebab-sebab internal.

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan (Tuanakotta, 2012:4). Akuntansi forensik dapat diterapkan di sektor publik maupun swasta, sehingga apabila memasukkan pihak yang berbeda maka akuntansi forensik menurut D. Larry Crumbey dalam Tuanakotta (2012:5) dari Journal of Forensic Accounting menuliskan “Simply put, forensic accounting is legally accurate accounting. That is, accounting that is sustainable in some adversarial legal proceeding, or within some judicial or administrative review.” (“secara sederhana akuntansi forensik dapat dikatakan sebagai akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, atau akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial, atau tinjauan administrative.”).

Menurut Bologna dan Lindquist yang dikutip dalam (Crumbley & Nicholas, 2002) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai “forensic and investigative accounting is the

application of financial skills and an investigative mentality to unresolved issues, conducted within the context of the rules of evidence”, dengan terjemahan sebagai berikut ‘akuntansi forensik dan investigasi adalah aplikasi kecakapan finansial dan sebuah mentalitas penyelidikan terhadap isu-isu yang tak terpecahkan, yang dijalankan dalam konteks rules of evidence’.

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi yang berdasarkan pada keterampilan-keterampilan dalam menginvestigasi dan menganalisis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum. Seorang akuntan forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, investigasi dan kriminologi untuk mengungkap fraud, menemukan bukti dan selanjutnya bukti tersebut akan dibawa ke pengadilan jika dibutuhkan (Ramaswamy, 2007).

Audit Investigatif

Akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan sederhana antara akuntansi dan hukum. Namun seiring perkembangan, akuntansi forensik menjadi lebih kompleks karena selain bidang akuntansi dan hukum yakni melibatkan satu bidang lagi yaitu audit. Karena adanya kompleksitas di sektor bisnis dan perkembangan investasi yang pesat hal inilah yang membuat risiko terjadinya fraud semakin tinggi.

Fraud adalah penggelapan yang meliputi berbagai kecurangan antara lain penipuan yang disengaja (intentional deceit), pemalsuan rekening (falsification of account), praktik jahat (corrupt practices), penggelapan atau pencurian (embezzlement), korupsi (corruption), dan sebagainya (Jones dan Bates, 1990). Oleh karena itu untuk memperkecil akibat fraud dan memperbaiki sistem pengendalian, perusahaan diharapkan mengambil langkah yang tepat dengan melakukan audit investigasi.

Pelaksanaan audit investigasi lebih mendasarkan kepada pola pikir bahwa untuk mengungkapkan suatu kecurangan auditor harus berpikir seperti pelaku fraud itu sendiri, dengan mendasarkan pelaksanaan prosedur yang ditetapkan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tindak lanjut pemeriksaan. Untuk itu auditor harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya fraud yang terjadi dan sebelumnya telah diindikasikan oleh berbagai pihak. Auditor harus peka terhadap semua hal yang tidak wajar.

Auditor juga harus mempunyai kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan, dan kemampuan untuk menarik kesimpulan. Paling penting bagi seorang auditor adalah kemampuan menyederhanakan konsep-konsep keuangan sehingga orang-orang pada umumnya dapat memahami apa yang dimaksudkannya. Sehingga Tuanakotta merumuskan auditor investigatif (2007 :49) adalah “gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan detektif (atau investigator)”.

Pendapat audit investigatif yang dikemukakan oleh Messier (2003:17) yaitu ‘Forensic audit is an audit to detection or deterrence of a wide variety of fraudulent activities. The use of auditing

to conduct forensic audits has grown significantly, especially where the fraud involves financial issues' ('Audit forensik adalah audit untuk mendeteksi atau mencegah berbagai macam kegiatan penipuan. Penggunaan audit untuk melakukan audit forensik telah berkembang secara signifikan, terutama jika penipuan melibatkan masalah keuangan'). Menurut Association Of Certified Fraud Examiner mendefinisikan Audit Investigatif sebagai berikut "Fraud auditing is an initial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information, analytical relationship and an awareness of fraud perpetration and concealment effort" ('Audit kecurangan adalah pendekatan awal (proaktif) untuk mendeteksi penipuan keuangan, menggunakan catatan dan informasi akuntansi, hubungan analitis, dan kesadaran akan upaya pencegahan dan penyembunyian penipuan').

Prosedur Audit

Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit (Mulyadi,2002). Auditor melakukan prosedur ini agar tidak terjadi penyimpangan dalam melakukan program audit. Standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan bahwa beberapa prosedur audit yang harus dilaksanakan oleh auditor meliputi (Mulyadi dan Kanaka,2002) yaitu:

1. Insepkesi
2. Pengamatan
3. Permintaan Keterangan
4. Konfirmasi
5. Penelusuran
6. Pemeriksaan Bukti Pendukung
7. Perhitungan
8. Scaning
9. Pelaksanaan Ulang
10. Teknik Audit Berbasis Komputer

Kemampuan Auditor

Menurut Grippo dan Ibex (2003) dalam Digabriele (2008) menyatakan bahwa sebagian besar keahlian auditor forensik datang dari kemampuannya dalam bidang akuntansi dan audit, pajak, operasi bisnis, maajemen, pengendalian intern, hubungan interpersonal, dan komunikasi. Keahlian menurut Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)

No.Per/05/M.PAN/03/2008 bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan kriteria auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S1) atau yang setara, memiliki kompetensi di bidang auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi serta telah mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) serta mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (continuing professional education).

Kemampuan Sistem Informasi Auditor

Pendekatan atau cara pandang terhadap sistem akuntansi yang semula stand alone, kini berubah menjadi sistem informasi akuntansi makin terpadu dengan keseluruhan sistem informasi perusahaan. Akibatnya area audit laporan keuangan makin saling terkait dengan bidang operasional, teknologi informasi dan makin luas ruang lingkupnya (Gondodiyoto, 2007). Pengetahuan teknologi informasi dan akuntansi perlu diberikan pada berbagai tahapan maupun tingkatannya masing-masing, antara lain:

a. Pre-Post Qualification

Pada masa yang akan datang, auditor tidak hanya akan bekerja sebagai akuntan secara konvensional, tetapi juga tidak dapat menghindari bekerja di lingkungan teknologi informasi. Standar pengetahuan minimal dalam teknologi informasi harus ditetapkan dan pelatihan berkelanjutan harus diberikan dalam pendidikan profesi.

b. Conceptual Knowledge/Practical Skill

Pengetahuan teknologi informasi tidak hanya merupakan ide-ide tetapi juga keterampilan yang dapat diterapkan. Pendidikan dan pelatihan harus memberikan pengetahuan konseptual dan keterampilan teknik, serta dasar untuk pengembangan diri yang lebih lanjut.

Menurut Hamid (2012), tidak peduli apakah perusahaan menjalankan sistem secara manual, terkomputerisasi, atau keduanya, auditor harus mematuhi Standar Audit Umum yang Diterima

Prosedur Pelaksanaan Audit Investigasi

Sebagaimana dijelaskan oleh Pusdiklatwas BPKP (2008:77), proses audit investigasi terdiri dari berbagai langkah-langkah yang umumnya dibagi menjadi lima tahap yaitu penelaahan informasi awal, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut.

Tahap pertama yang dilakukan oleh auditor investigatif adalah pengelolaan informasi awal. Ini dilakukan dengan memeriksa informasi dari berbagai sumber, termasuk pengaduan masyarakat, media massa, dokumen cetak dan visual, lembaga, dan hasil audit rutin. Auditor investigatif akan memutuskan apakah ada cukup bukti atau alasan untuk melakukan audit investigasi untuk membuktikan kecurangan setelah mendapatkan dan mempelajari informasi. Setelah itu, auditor

investigasi menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan susunan tim sebelum melaksanakan audit. Sebelum penyusunan laporan akhir audit investigasi, para penegak hukum diminta pendapat tentang prosedur dan hasil audit untuk memastikan bahwa bukti audit dikumpulkan sesuai dengan peraturan hukum.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa auditor investigatif harus melakukan prosedur tersebut secara bertahap selama pelaksanaan audit investigasi untuk pembuktian kecurangan. Setelah melakukan prosedur tersebut, auditor tersebut dapat dianggap memiliki kemampuan yang memadai.

Kecurangan (Fraud)

Menurut Bologna dan Lindquist (2013:4), fraud didefinisikan sebagai penipuan yang disengaja, yang umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan, dan pencurian. Semua orang, termasuk pelanggan, kreditor, pemasok, bank, investor, penjamin asuransi, dan pemerintah, dan pemerintah dapat terkena penipuan. kecurangan manajemen dikemukakan oleh Sunarto (2003:57) sebagai berikut, “Kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, seringkali disebut kecurangan manajemen.”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan secara observasional dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis literatur untuk mengetahui pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit investigatif. Hal ini dilakukan dengan menggunakan literatur digital dari berbagai sumber. Kontribusi utama penelitian ini adalah dengan menggunakan seluruh kajian dan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu kompetensi dan independensi penyidik dengan memperhatikan kualitas hasil audit.

Adapun tahapan studi literatur yaitu pertama, melihat atau menggali fenomena, yakni fakta dan data dari sumber yang dapat dipercaya dan disebutkan subernya untuk menunjukkan pentingnya penelitian. Kedua, adanya middle theory yang relevan dengan penelitian dan menjelaskan variabel yang diteliti. Ketiga, study literatur harus mencantumkan pemikiran kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian orang lain. Keempat, menganalisis apakah grand atau middle theory dan apakah perlu didefinisikan kembali atas pemikiran kritis. Ketujuh, dari poin-poin tersebut dibuat kesimpulan yang merujuk pada topik penelitian dengan penyajiannya berupa deskripsi yang sudah diolah menggunakan bahasa sendiri.

PEMBAHASAN

Menginvestigasi pemanfaatan sepuluh kompetensi umum auditor internal dalam keterampilan dan kemampuan auditor internal untuk melakukan pendeteksian fraud. Kompetensi diukur

dalam kaitannya cognitive development yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik. Perkembangan kognitif dianggap tidak terpisahkan dari perkembangan motorik atau skill.

Auditor harus mampu memberikan layanan audit dengan menerapkan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang relevan. Kemampuan auditor untuk menemukan tanda-tanda fraud sangat didukung oleh kompetensi komunikasi. Kemampuan komunikasi memungkinkan auditor untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi serta mendapatkan akses ke seluruh objek audit selama proses audit.

Selain itu ketiga ini tata kelola, risiko, dan pengendalian, kompetensi berpikir analitis, dan komitmen pengembangan kompetensi dan inovasi juga dapat memberikan kontribusi kemampuan pendeteksian fraud. Kemampuan berpikir analitis dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti melakukan inovasi, menyarankan strategi organisasi untuk diperbaiki, dan memprediksi perubahan untuk menjadi lebih efektif di masa depan (IIA, 2013). Tidak sama dengan kompetensi etika profesional, manajemen audit internal, pemahaman tentang standar praktik profesional, dan kemahiran bisnis tingkat menengah. Selain itu, keempat kemampuan ini tidak akan memungkinkan Anda untuk mendeteksi penipuan. Auditor internal melakukan pengauditan dengan kemampuan ini. Kemampuan ini yang sangat penting bagi auditor karena mereka bersifat etis dan profesional untuk menghilangkan hal-hal yang dapat memengaruhi hasil pekerjaan, terutama untuk menemukan penipuan.

Dengan auditor internal terlibat dalam tim fraud, semakin penting bagi mereka untuk menguasai kompetensi inti. Akibatnya, kemampuan auditor internal untuk mencegah dan mendeteksi fraud sangat penting. Dengan meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan keahlian auditor SPI, kemampuan pendeteksian fraud masih dapat ditingkatkan. Tiga dimensi ini termasuk auditor internal sebagai pembelajar yang terbuka dan berpartisipasi secara mandiri dalam pengembangan keterampilan. Kedua, mereka memiliki dukungan dari instruktur internal dan eksternal dan berfungsi sebagai fasilitator. Namun, pemilihan materi dan pemberian tantangan pendeteksian fraud diperlukan untuk meningkatkan kemampuan, terutama dalam pendeteksian fraud.

Kompetensi inti yang dimiliki auditor internal dapat membantu auditor internal lebih akurat dan presisi dalam melakukan pendeteksian fraud. Selain itu, setiap kompetensi inti tersebut dapat menuntun auditor internal lebih cermat dalam mengidentifikasi red flags dan mendeteksi fraud baik ketika terdapat penugasan khusus maupun secara spontan. Akibatnya, auditor internal tidak lagi mendeteksi potensi fraud hanya berdasarkan feeling atau firasat lagi, namun juga berdasarkan kompetensi yang matang.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teori dan pembahasan makalah terkait, maka menginvestigasi pemanfaatan sepuluh kompetensi umum auditor internal dalam keterampilan dan kemampuan auditor internal untuk melakukan pendeteksian fraud. Selain itu ketiga ini tata kelola, risiko, dan pengendalian, kompetensi berpikir analitis, dan komitmen pengembangan kompetensi dan inovasi juga dapat memberikan kontribusi kemampuan pendeteksian fraud. Kemampuan ini yang sangat penting bagi auditor karena mereka bersifat etis dan profesional untuk

menghilangkan hal-hal yang dapat memengaruhi hasil pekerjaan, terutama untuk menemukan penipuan.

Dengan auditor internal terlibat dalam tim fraud, semakin penting bagi mereka untuk menguasai kompetensi inti. Akibatnya, kemampuan auditor internal untuk mencegah dan mendeteksi fraud sangat penting. Dengan meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan keahlian auditor SPI, kemampuan pendeteksian fraud masih dapat ditingkatkan. Tiga dimensi ini termasuk auditor internal sebagai pembelajar yang terbuka dan berpartisipasi secara mandiri dalam pengembangan keterampilan.

Kompetensi inti yang dimiliki auditor internal dapat membantu auditor internal lebih akurat dan presisi dalam melakukan pendeteksian fraud. Selain itu, setiap kompetensi inti tersebut dapat menuntun auditor internal lebih cermat dalam mengidentifikasi red flags dan mendeteksi fraud baik ketika terdapat penugasan khusus maupun secara spontan. Akibatnya, auditor internal tidak lagi mendeteksi potensi fraud hanya berdasarkan feeling atau firasat lagi, namun juga berdasarkan kompetensi yang matang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, tinjauan literatur menunjukkan bahwa selain independensi dan kompetensi auditor, masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit investigasi. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah karakteristik lain yang disebutkan dalam artikel ini dapat mempengaruhi kualitas hasil audit investigasi. Faktor lainnya antara lain motivasi, integritas auditor, pengalaman kerja, pemahaman, etika audit, dan profesionalisme.

DAFTAR REFERENSI

- Alvin A, A., Randal J, E., & Beasley, M. (2011). Auditing and Assurance Services, an Integrated Approach. New Jersey: Prentice-Hall.Inc.
- Sasa, A. A. (2012). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Kemampuan Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Dan Kehutanan (Dkp2k) Kota Batam. CBIS Journal, 2337 – 8794.
- Theodorus M, T. (2012). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.
- The Institute of Internal Auditors, D. (2013). The IIA's Global Internal Audit Competency Framework.
- BPKP. 2010. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor. Jakarat: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- ACFE. 2016. Survai Fraud Indonesia 2016. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter, 2017.
- IIA. 2013. The IIA's Global Internal Audit Competency Framework. Florida: IIA

- Puspita, P. R., Rupa , I., & Rini, G. S. (2020). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. *Riset Akuntansi Warmadewa* , 29-33.
- Rivani, A. A., & Triyanto, D. N. (2018). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Survey pada auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat). *E-Proceeding Of Management* , 3437.
- Imron, M. A., Widyastuti , T., & Amilin . (2017). Pengaruh Pengetahuan Audit, Independensi dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit Investigasi pada Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Ilmiah Widya Ekonomika* .
- Irmana. (2018). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)*. Makassar .
- Jannah, R. (2021). Peran Kompetensi Auditor Terhadap Hasil Audit Investigasi Dalam Pembuktian Kecurangan. *Akunsyah : Jurnal Akuntansi & Keuangan Syariah* 1 (1), 54-64.